

## Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan

Muhtar Haboddin, La Ode Machdani Afala

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

Received: 1 Maret 2020

Revised: 18 April 2020

Published: 27 April 2021

### Abstrak:

Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya *power sharing* dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. *Power sharing* dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan merupakan kelas sosial teratas dalam pelapisan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Sulawesi Selatan, berbagi kekuasaan antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, tetapi juga sebagai strategi dalam mendapatkan kekuasaan gubernur. Ini dibuktikan dengan kemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Mereka mewakili kemenangan Makassar dan Bugis di satu sisi, sementara di sisi lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis mendorong orang untuk menyatukan suara mereka dengan mengikuti jalur etnis untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kekuasaan. Koalisi etnis yang dikombinasikan dengan koalisi antara bangsawan membuat artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya yang hanya mengeksplorasi politik pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentingnya status sosial dalam kontetasi politik. Bangsawan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan cerdas dalam masyarakat majemuk yang merindukan kehadiran kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.

### Keywords:

pembagian kekuasaan; pemilihan gubernur; kebangsawan; strategi politik

### Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang pentingnya *power sharing* dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Dalam konteks politik Sulawesi Selatan, *power sharing* merupakan strategi elite lokal yang diperankan antara bangsawan Bugis dan Makassar dalam pemilihan gubernur. Secara garis besar ada tiga etnis yang mendiami provinsi Sulawesi Selatan,

### Korespodensi:

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang Jl. Universitas Brawijaya, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.  
Email: muhtar\_haboddin@ub.ac.id

yakni Bugis, Makassar, dan Toraja. Dari tiga etnisitas tersebut, yang bertarung dalam memperebutkan jabatan gubernur terpusat pada Bugis dan Makassar, sedangkan etnis Toraja berada di pinggiran kekuasaan. Secara umum, persaingan untuk meraih jabatan gubernur dimonopoli oleh Bugis dan Makassar. Fenomena ini terjadi sejak era reformasi dimana persaingan antara Bugis dan Makassar dalam pemilihan gubernur sangat cair. Hal ini dikarenakan gubernur terpilih biasanya mengikuti garis etnisitas tersebut. Misalnya, selama lima belas tahun terakhir yang berkuasa sebagai gubernur berasal dari Bugis dan Makassar. Dua etnisitas ini merepresentasikan dua kekuatan besar yang saling berkoalisi dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan daerah (Heryanto, 2004: 6).

Politik berbagi kuasa berlangsung di Tanah Angin Mammiri sangat berbeda di tempat lain. Misalnya dengan melibatkan kelas sosial, yang direpresentasikan bangsawan dan non bangsawan sebagai poin penting dalam meraih kekuasaan gubernur. Pemanfaatan kelas sosial dalam pemilihan gubernur memiliki daya tarik tersendiri karena sejarah politik Sulawesi Selatan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan antara kaum bangsawan dan non bangsawan. Inilah yang kami maksud perbedaan dengan karya yang sudah ada. Perbedaan ini merupakan terobosan karena tercipta koalisi antaretnis (Makassar-Bugis) dan koalisi antarbangsawan—yang meskipun saling menaklukkan lewat pemilihan, namun terhindar dari bahasa politisasi identitas. Bahasa politisasi identitas tidak hadir dan laku untuk dijual dalam pemilihan gubernur 2018 karena terwakili melalui politik berbagi kuasa. Dari empat pasangan calon tersebut, ada dua yang mempraktikkan *power sharing*, sedangkan dua pasangan calon yang lain berusaha mempertahankan identitas ke-Bugisan-nya. Ini merupakan pilihan politik yang arogan dalam masyarakat plural seperti Sulawesi Selatan—yang selama lima belas tahun terakhir mempraktikkan *power sharing* dalam penempatan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Bila dicermati secara seksama melalui perhitungan politis, pilihan *power sharing* merupakan solusi untuk memastikan bahwa proses sirkulasi elite berpijak pada politik representasi, baik berdasarkan pada etnis, agama, bahasa, dan kedaerahan tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi untuk menciptakan keharmonisan dalam politik dan pemerintahan (Sanderson, 2000: 384). Sejalan dengan itu, *power sharing* yang berbasiskan etnisitas, kedaerahan, dan kelas sosial memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan daerah dari waktu ke waktu secara teratur dan demokratis (Diamond & Plattner, 1998: 28). Sebab, prioritas elite politik berpartisipasi adalah memenangkan diri dalam pemilihan gubernur itu sendiri (Santoso, 2018: 44).

Dalam konteks pemilihan gubernur 2018 di Sulawesi Selatan—yang menjadi pemenangnya adalah Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Kemenangan ini merupakan bagian dari praktik *power sharing*. Nurdin Abdullah sebagai gubernur merepresentasikan etnis Makassar dengan daerah asal Bantaeng. Dalam pembilahan

politik kewilayahan ini merupakan bagian dari jazirah Makassar—yang biasa disebut daerah Selatan Selatan. Sedangkan Andi Sudirman Sulaiman selalu wakil gubernur mewakili etnis Bugis dengan wilayah asal Bone. Dalam pembilahan politik dikenal dengan sebutan BOSOWA . Tidak hanya itu, keterpilihan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur menegaskan keunggulan kaum bangsawan bila dibandingkan non-bangsawan dalam pemilihan secara langsung. Karena itu, *power sharing* dalam pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan tidak hanya berbasiskan identitas diri (etnis, agama, bahasa, dan kedaerahan) melalui garis horizontal, tetapi juga secara vertikal melalui pelapisan masyarakat yakni kelas atas—bangsawan dan lapisan bawah masyarakat biasa disebut orang kebanyakan. Dalam kehidupan sosial relasi bangsawan dan masyarakat cukup tajam perbedaannya (Nasikun, 2001: 28). Karena ada jarak hierarki dan derajat vertikalitas masih kuat dan kokoh Manguelle (2006: 114) dalam struktur politik Sulawesi Selatan. Bahkan, kaum bangsawan sangat dominan peranannya dalam politik dan pemerintahan (Bloch, 1983: 34).

Cara pandang di atas yang ingin ditawarkan dalam tulisan ini bahwa *power sharing* tidak hanya berfokus pada kategori identitas, tetapi menambahkan kategori kelas sosial seperti kebangsawanan. Penambahan informasi ini membedakan dengan kajian sebelumnya. Misalnya, Pariela di Maluku berfokus pada pemanfaatan identitas dalam menggalang kekuatan kolektif dalam meraih kekuasaan (Pariela, 2009: 57). Sementara wartawan Kompas menemukan cara kerja etnisitas dan politik kekerabatan dalam pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara (Suwardi, Harsono, & Dkk, 2002). Sejalan dengan itu, menguatnya politik identitas juga terjadi dalam pemilihan gubernur di DKI (2018). Semua tulisan ini hanya melihat pemanfaatan etnisitas dalam meraih kekuasaan. Sementara, pembahasan mengenai koalisi kebangsawan dalam pemilihan gubernur belum menjadi perhatian bagi analisis politik lokal.

Pemahaman ini di bangun melalui pembacaan sejumlah literatur yang terkait dengan *power sharing* (Strauss, Anselm, & Corbin, 2003: 31). Dari pemahaman tersebut, maka Jurnal ini merupakan bagian dari studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui pembacaan kritis beragam literatur. Keragaman literatur membutuhkan kemampuan memberikan makna bagi data tersebut (Strauss et al., 2003: 30). Sebab, salah satu kelebihan dari studi kasus adalah kemampuannya menampilkan peristiwa kontemporer (Yin 2006, 13), berupa kreasi *power sharing* dalam pemilihan gubernur. Karena itu, tulisan ini berusaha menawarkan penjelasan alternatif oleh Stavenhagen (2004: 113) yang mengedepankan pertimbangan kaum bangsawan dalam pemilihan gubernur. Sebab, mereka yang berpengaruh dan menjadi tokoh pemimpin lokal. Dengan demikian, *power sharing* antarkaum bangsawan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemilih yang lebih luas (Gianie, 2009).

Jurnal ini dibagi menjadi empat bagian. Di bagian pertama mencoba memaparkan sejumlah kajian *power sharing* dalam dinamika politik lokal. Tujuan dari kajian literatur ini untuk memastikan posisi jurnal ini diantara tumpukan tulisan yang sejenis di satu sisi, sementara disisi yang lain mengambil jarak dengan menampilkan bagian-bagian berbeda, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya, dengan memasukkan kelas sosial sebagai strategi dalam berbagi kekuasaan. Bagian kedua memaparkan pluralisme masyarakat Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan *profiling* kandidat calon gubernur. Pluralisme masyarakat tercermin dalam pasangan calon gubernur. Ini membuktikan cara politik identitas dan kelas sosial yang hadir secara bersama-sama sebagai bentuk keluwesan dan kompromi politik antara elite dalam rangka merayakan masyarakat multietnis (Mandal, 2007:1 231). Bagian ketiga lebih khusus menelaah politik berbagi kuasa dalam pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan. Politik berbagi kuasa tergambar melalui sirkulasi elite yang direpresentasikan oleh kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Maksudnya, yang memimpin Sulawesi Selatan saling bergantian antara kaum bangsawan dengan non-bangsawan atau sebaliknya dari non-bangsawan ke kaum bangsawan. Bagian terakhir adalah penarikan kesimpulan secara kritis dengan menyertakan apa-apa yang perlu dilakukan sebagai agenda riset ke depan.

### ***Kajian Power Sharing***

Jagat politik lokal sudah lama didominasi kajian diseputar elite lokal, politik identitas atau gabungan keduanya. Kajian yang ada selalu difokuskan pada stigmatisasi elite lokal karena diyakini mereka bisa berkuasa karena memanfaatkan identitas dalam meraih kekuasaan kepala daerah atau gubernur. Misalnya, Afala mengatakan bahwa hampir dipastikan, semua elite lokal menggunakan isu politik identitas sebagai cara merebut kekuasaan, baik pada level lokal maupun nasional (Afala, 2018: 4). Penjelasan seperti ini juga terkonfirmasi dalam karya Gazalirrahman di Barito Utara, menurutnya, semua kandidat kepala daerah menggunakan identitas, agama, dan kedaerahan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat (Gazalirrahman, 2009: 14). Sedangkan, temuan Fahmid di Sulawesi Selatan, juga menemukan perilaku elite lokal yang sengaja memobilisasi identitasnya dalam meraih kekuasaan gubernur. Namun, dibagian akhir bukunya *Identitas dalam Kekuasaan* menunjukkan perbedaan dengan karya Afala dan Gazalirrahman. Bagi Fahmid, ada pembagian kekuasaan berdasarkan etnis, kedaerahan, dan agama menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kekuasaan politik di Sulawesi Selatan (Fahmid, 2012: 234).

Penjelasan Fahmid jauh lebih lengkap ketimbang studi Tanasaldy dan Haboddin di Kalimantan Barat (Haboddin, 2012; Tanasaldy, 2007: 461). Bagi Tanasaldy dan Haboddin, *power sharing* yang berlangsung dalam pengisian jabatan kepala daerah di Kalimantan Barat berdasarkan etnisitas antara Melayu dengan Dayak.

Misalnya, ketika gubernurnya etnis Dayak, maka wakilnya berasal dari etnis Melayu. Begitu pula sebaliknya. Temuan Tanasaldy dan Haboddin dalam pembagian kekuasaan hanya fokus pada etnis Dayak dan Melayu. Padahal, kajian mutakhir perihal pembagian kekuasaan di Kalimantan Barat sudah berkembang aktornya dengan kehadiran etnis China dalam kekuasaan. Sebagaimana ditulis Haryanto (Haryanto, 2014: 171):

Dalam pemilihan gubernur ada kesepakatan diantara elit politik terhadap pembagian kekuasaan di Kalimantan Barat. Bila gubernur merupakan porsi kelompok etnis Dayak, wakil gubernur untuk etnis Tionghoa, dan posisi sekretaris daerah merupakan bagian kelompok etnis Melayu. Demikian pula, di jajaran birokrasi pemerintahan daerah, penerapan asas representasi atau keterwakilan kelompok etnis dalam penempatan juga dilakukan terutama dikalangan etnis Dayak, Melayu, dan China

Analisa Haryanto menunjukkan terjadi perubahan *power sharing* kekuasaan di Kalimantan Barat. Melayu, Dayak, dan China merupakan etnis utama yang memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian kekuasaan. Logika yang mendasari pembagian kekuasaan karena penerapan asas keterwakilan etnis. Penerapan asas keterwakilan kelompok etnis dalam kekuasaan merujuk Diamond dan Plattner disebut formula persamaan (Diamond & Plattner, 1998: 27; Mandal, 2007: 231). Formula persamaan ini diyakini bahwa pembagian kekuasaan untuk menangani perpecahan etnis pada masyarakat plural. Selanjutnya Diamond dan Plattner menulis:

Semua kelompok etnis harus diberikan jabatan kekuasaan. Dan tak satu pun kelompok etnis diperbolehkan untuk memonopoli politik secara permanen dalam pemerintahan. Kekuasaan harus terbuka untuk diperebutkan, sehingga terjadi berputar elit yang berkuasa. Karena sistem pemilu menjamin perputaran kekuasaan ini bisa berlangsung.

Pemilihan gubernur memang memberikan jaminan terjadinya sirkulasi elite dalam kekuasaan. Tetapi, tidak memberikan jaminan kepada etnisitas tertentu untuk tetap berkuasa dalam pemerintahan. Hal ini bisa terjadi karena yang menentukan keterpilihan seorang gubernur bukan DPRD tetapi masyarakat pemilih. Dalam sistem pilkada langsung pertarungan untuk meraih kekuasaan butuh kerja keras, ketokohan, dan sumber daya politik yang memadai. Sejalan dengan itu, dibutuhkan pula kecanggihan dalam merencanakan pembagian kekuasaan melalui penetapan pasangan calon yang berpijak pada asas perimbangan kelompok etnis dalam pemerintahan daerah. Hal ini bisa dibaca melalui pengisian jabatan gubernur Sulawesi Selatan pasca reformasi.

Dari semua literatur yang disajikan, *power sharing* lebih didominasi pada perkara asas keterwakilan etnis dan agama. Pertimbangan kelas sosial melalui kategori bangsawan dan orang kebanyakan belum disentuh oleh para analis politik lokal. Padahal, bagi masyarakat yang berlapis dan berjenjang logika *power sharing* selalu

memperhatikan eksistensi kaum bangsawan dalam panggung politik. Analisa Kleden menyebutkan peranan aristokrat lokal dalam politik selalu menjadi perkara diperhitungkan (Kleden, 2001: 23). Peran yang dimainkan oleh Andi merupakan gelar bangsawan Bugis dan Karaeng merupakan gelar bangsawan Makassar di Sulawesi Selatan sangat sentral dan menentukan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sebab, Andi dan Karaeng berhasil memelihara posisi mereka sebagai aristokrat—yang seakan-akan hanya mereka yang berhak atas kekuasaan penjelasan dalam Fahmid (2012: 320) karena kaum bangsawan pemegang kendali politik dan masyarakat. Menurut Polinggomang, bagi masyarakat, bangsawan bukan saja pemimpin politik melainkan pelaksana kekuasaan dari ornamen kerajaan yang memiliki titisan darah Tumanurung (Sahajuddin, 2011: 9).

### Masyarakat plural dan *Profiling* Kandidat Gubernur

Sulawesi Selatan merupakan masyarakat plural. Masyarakat plural bisa dimaknai suatu masyarakat majemuk dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Hefner, 2007: 29; Nasikun, 2001: 16). Pemaknaan masyarakat plural sebagaimana dikatakan Nasikun dan Hefner sangat samar karena tidak menyebutkan ‘dua atau lebih elemen yang hidup tanpa pembauran’ itu apa yang mereka maksud. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pemaknaan ini sangat berbeda dengan pendapat Geertz, (1981: 10) & Karim (2019: 11), ketika menjelaskan masyarakat plural langsung tertuju pada karakteristiknya, misalnya kesukuan, kedaerahan, perkauman (ras), bahasa, dan agama.

Gugus kategori Geertz dan Karim sangat cocok dalam melihat masyarakat Sulawesi Selatan—yang kemudian dikaitkan dengan *profiling* kandidat pasangan calon gubernur. Paling sedikit ada empat kategori Geertz yang bisa digunakan dalam memotret masyarakat Sulawesi Selatan. Pertama, sebaran wilayah kandidat. Ada empat daerah pembilahan wilayah atau biasa disebut geopolitik yang disepakati para analis Sulawesi Selatan, yakni daerah Selatan-Selatan di wakili pasangan calon No. 3 yakni Nurdin Abdullah dan pasangan calon No. 4 Ichsan Yasin Limpo. Daerah Bosowa diwakili pasangan calon No.1 Nurdin Halid. Daerah Ajatappareng diwakili pasangan calon No.2 yaitu Agus Arifin Numang. Sedangkan daerah Luwu Raya dalam pemilihan gubernur ini berposisi sebagai wakil gubernur saja, yakni A. Mussakar dan Abdul Aziz Mudzakkar.

Kedua, pluralitas etnis dalam pemilihan gubernur juga tersebar kecuali etnis Toraja. Dari empat pasangan calon gubernur posisinya sangat berimbang. Dua dari etnis Makassar yakni Nurdin Abdullah dan Ichsan Yasin Limpo. Sedangkan dua pasangan calon dari etnis Bugis yaitu Nurdin Halid dan Agus Arifin Nu'mang. Komposisi yang berimbang ini mewakili dua etnis dominan di Sulawesi Selatan. Bila

ditarik dari politik kesejarahan di Sulawesi Selatan, merujuk Haboddin dan Afala hanya dua etnis yang memiliki rekam jejak yang pernah menjabat sebagai gubernur (Afala, 2019: 6). Hal ini terungkap pada tabel 1.

Tabel 1. Etnisitas Gubernur Sulsel

| Nama                  | Tahun     | Etnisitas |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Lanto Dg Pasewang     | 1953-1955 | Makassar  |
| A.Pangerang Pettarani | 1955-1966 | Makassar  |
| Ahmad Lamo            | 1966-1978 | Bugis     |
| Andi Oddang           | 1978-1983 | Bugis     |
| Ahmad Amiruddin       | 1983-1993 | Bugis     |
| Andi ZB Palaguna      | 1993-2003 | Bugis     |
| Amin Syam             | 2003-2008 | Bugis     |
| Syahrul Yasin Limpo   | 2008-2018 | Makassar  |
| Nurdin Abdullah       | 2018-2013 | Makassar  |

Sumber: Haboddin & Afala (2019: 6)

Bila mengacu pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa sejak tahun 1953 sampai 2018 sudah sembilan gubernur. Dari sembilan gubernur tersebut, ada lima berasal dari etnis Bugis, yakni Ahmad Lamo, Andi Oddang, Ahmad Amiruddin, Andi ZB Palaguna, dan Amin Syam. Sedangkan gubernur yang berasal dari etnis Makassar ada empat, yakni Lanto Daeng Pasewang, Andi Pangerang Pettarani, Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Abdullah. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa politik keterwakilan etnisitas masih diseputar etnis Makassar dan Bugis. Jadi, kepemimpinan gubernur di Sulawesi Selatan dari masa lalu hingga masa kini belum berubah. Etnis Bugis dan Makassar secara berganti menjadi gubernur. Hal ini pula menunjukkan kapasitas mereka sebagai elite yang memerintah. Sebuah kreasi yang sempurna yang memungkinkan kedua etnisitas tersebut tetap bertahan dan berkuasa selama puluhan tahun dalam pemerintahan provinsi (Bellamy, 1990: 40).

Ketiga, pluralitas juga tercermin dari profesi pasangan calon gubernur. Profesi merupakan kategori sosiologis yang senantiasa memiliki nilai tawar secara politis. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang paternalistik pilihan jenis pekerjaan sangat penting maknanya. Karena mencerminkan sifat, pencapaian pribadi, dan kualitas seorang pemimpin (Fahmid, 2012: 11). Sedangkan cara lain dalam memaknai profesi pasangan calon gubernur melalui sebutan politisi, mantan kepala daerah, birokrat, dan pengusaha. Cara ini sejalan dengan Hadiz dan Haboddin yang menyebutkan bahwa elite lokal dikuasai oleh politisi, birokrat, bisnis, dan militer (Haboddin & Afala, 2019: 43; Robison & Hadiz, 2004: 258-259). Selanjutnya, Hadiz mengatakan bahwa kekuasaan di tingkat lokal dikuasai oleh elit oligarki. Pendapat Hadiz tentu ada benarnya dengan melihat *profiling* kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Ada pun latarbelakang profesi/pekerjaan paslon gubernur Sulawesi Selatan bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2 Profesi pasangan calon gubernur

| No | Nama                   | Profesi pekerjaan                      |
|----|------------------------|--|
| 1  | Nurdin Halid           | Politisi Golkar                        |
|    | Abdul Aziz QM          | Mantan Anggota DPD                     |
| 2  | Agus Arifin Nu'mang    | Mantan Wakil gubernur                  |
|    | Tanribali Lamo         | Mantan Dirjen Kesbangpol<br>Kemendagri |
| 3  | Nurdin Abdullah        | Mantan Bupati Bantaeng                 |
|    | Andi Sudirman Sulaeman | Swasta                                 |
| 4  | Ichsan Yasin Limpo     | Mantan Bupati Gowa                     |
|    | A. Musakkar            | Mantan Bupati Luwu                     |

Keempat, pluralitas masyarakat Sulawesi Selatan juga terpotret dalam kelas sosial. Masyarakat Sulawesi merupakan masyarakat berjenjang yang terdiri bangsawan dan non-bangsawan. Dua kategori kelas sosial ini tergambar pada pasangan calon gubernur. Dari empat pasangan calon gubernur tersebut yang berdarah bangsawan adalah pasangan No.3 dan wakil dari pasangan calon No.4. Sedangkan pasangan calon No.1 dan No.2 berasal dari orang kebanyakan. Dengan komposisi ini, maka bisa dibayangkan bahwa pemilihan gubernur merupakan pertarungan antara kaum bangsawan melawan orang kebanyakan. Pertarungan ini berlangsung sengit dalam penjelasan Fahmid, 2012: 12) karena merepresentasikan dua strata sosial yang berbeda dalam masyarakat untuk menjadi yang terbaik dan terunggul dalam sirkulasi elite politik.

Uraian singkat di atas memberikan gambaran perihal pluralisme masyarakat yang terwakili dalam pasangan calon gubernur. Pluralitas tersebut menunjukkan bahwa pemilihan gubernur sudah mengarah pada perayaan polisentrisme aktor, identitas, dan kelas sosial. Wajah pluralis ini menunjukkan betapa bergairahnya elite lokal dalam usaha merebut kekuasaan. Hal ini pula menjelaskan bahwa jabatan gubernur sangat mempesona, sehingga dua etnis dominan yakni Makassar dan Bugis berusaha meraihnya. Caranya adalah melalui *power sharing* agar dua etnis tersebut bisa terwakili dalam kekuasaan pemerintahan daerah.

### **Power Sharing dalam Pemilihan gubernur**

Pembagian kekuasaan menurut Kleden bisa dilakukan melalui kekuatan politik yang ada dalam masyarakat (Kleden, 2001: 208). Dalam masyarakat plural seperti Sulawesi Selatan, pembagian kekuasaan dilakukan melalui kekuatan etnisitas. Pendapat ini sesuai dengan pengalaman sejarah selama lima belas tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada tabel 3.



Tabel 3. Pembagian Kekuasaan berdasarkan Etnisitas

| Gubernur/wakil gubernur | Periode   | Etnis    | Status sosial |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Amin Syam               | 2003-2008 | Bugis    | Non-bangsawan |
| Syahrul Yasin Limpo     |           | Makassar | Non-bangsawan |
| Syahrul Yasin Limpo     | 2008-2018 | Makassar | Non-bangsawan |
| Agus Arifin Nu'mang     |           | Bugis    | Non-bangsawan |

Pada tabel 3 ada dua catatan penting untuk ditelaah lebih lanjut. Pertama, secara umum yang menjabat sebagai gubernur maupun wakil gubernur diwakili oleh etnis Bugis dan Makassar. Tahun 2003 ketika sistem pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD yang menjadi gubernur adalah Amin Syam seorang tentara yang beretnis Bugis dan wakilnya adalah Syahrul Yasin Limpo yang beretnis Makassar. Keterpilihan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur membuktikan keterwakilan etnis Bugis dan Makassar dalam kekuasaan. Selanjutnya, ketika sistem pemilihan mengalami perubahan, yakni dari anggota DPRD menjadi pilihan rakyat secara langsung representasi etnisitas tetap sama, yakni Bugis dan Makassar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Yang berubah hanya aktornya. Jika pada pemilihan gubernur 2003 gubernur dari etnis Bugis dan wakilnya dari Makassar, maka pada pemilihan gubernur 2008-2018 yang menjadi gubernur adalah etnis Makassar dan wakilnya dari etnis Bugis.

Kedua, selama periode 2003-2018 yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan berasal dari golongan non-bangsawan. Ini membuktikan kemampuan dan keunggulan golongan non-bangsawan dalam kontestasi politik, baik secara langsung karena dipilih masyarakat maupun tidak langsung karena dipilih wakil rakyat di palemén. Kemenangan golongan non-bangsawan sebagai gubernur selama lima belas tahun lamanya merupakan prestasi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kepemimpinan gubernur di Sulawesi Selatan.

Jika kita merujuk sejarah kepemimpinan gubernur dari 1953 selalu berselang seling berdasarkan strata sosialnya. Misalnya, golongan non-bangsawan dimulai dari Lanto Daeng Pasewang berkuasa 1953-1955 kemudian diganti dengan seorang bangsawan, Andi Pangerang Pettarani (1955-1966). Kepemimpinan selanjutnya kembali dipimpin non-bangsawan yakni Ahmad Lamo (1966-1978). Sesudah Ahmad Lamo, kaum bangsawan kembali berkuasa dengan terpilihnya Andi Oddang (1978-1983). Pada periode berikutnya, kaum bangsawan digantikan oleh non-bangsawan dengan terpilihnya Ahmad Amiruddin (1983-1993). Ahmad Amiruddin merupakan ilmuwan pertama dari Unhas yang berhasil menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Setelah masa jabatannya berakhir, kembali kaum bangsawan berkuasa dari tahun 1993-2003. Andi ZB Palaguna merupakan bangsawan Bugis terakhir yang menjadi gubernur. Dikatakan terakhir karena selama lima belas tahun berikutnya yang

memimpin Sulawesi Selatan berada di golongan non-bangsawan. Sebagaimana tergambar pada tabel 3.

Persaingan antarstrata atau kelas sosial terus berlangsung dalam pemilihan gubernur. Pada pemilihan gubernur 2018-2023 bisa dipetakan menjadi dua kelompok dari kelas sosial yang berbeda. Pasangan Nurdin Halid dan Agus Arifin Nu'mang dari golongan non bangsawan berhadapan dengan pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Muzakkar dari golongan bangsawan. Hasil akhir dari pertarungan tersebut dimenangkan oleh golongan bangsawan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 4.

Tabel 4. Kemenangan Nurdin Abdullah

| Nama                   | Prosentase | Kelas sosial  |
|------------------------|------------|---------------|
| Nurdin Halid           | 27,32      | Non-bangsawan |
| Abdul Aziz Mudzakkar   |            | Non-bangsawan |
| Agus Arifin Nu'mang    | 9,85       | Non-bangsawan |
| Tanribali Lamo         |            | Non-bangsawan |
| Nurdin Abdullah        | 43,87      | Bangsawan     |
| Andi Sudirman Sulaiman |            | Bangsawan     |
| Ichsan Yasin Limpo     | 18,97      | Non-bangsawan |
| Andi Muzakkar          |            | Bangsawan     |

Sumber: Dokumen KPU Provinsi, 2018

Politik berbagi kuasa dengan komposisi berkoalisi sesama kaum bangsawan, berkoalisi antara bangsawan dengan non-bangsawan atau koalisi non-bangsawan sengaja dipilih dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Namun, fakta berkata lain yang menjadi pemenangnya justru yang berlatar belakang kaum bangsawan. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman berhasil menyingkirkan tiga pasangan lainnya. Kemenangan pasangan nomor tiga tersebut disebabkan dua pertimbangan.

Pertama, ada kesamaan masa lalu yang menempatkan kaum bangsawan sebagai pemimpin politik. Kesamaan sejarah memungkinkan mereka untuk berbagi kekuasaan dalam penempatan posisi. Posisi Nurdin Abdullah sebagai gubernur karena sudah terbukti dalam memimpin Bantaeng. Selain itu, Nurdin Abdullah juga mampu menggunakan kekuasaannya dalam menghasilkan kebijakan yang populis dan bermanfaat bagi masyarakat Bantaeng (Izzah & Atmansyah, 2014: 7). Dengan capaian dan prestasi tersebut kemudian dilengkapi dengan ketokohan dan popularitas dalam Afala (2019: 9), mengharuskan Nurdin Abdullah sebagai gubernur. Sedangkan Andi Sudirman menduduki jabatan wakil karena pertimbangan politis dan sosoknya memang tidak terlalu familiar dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, melalui politik berbagi kuasa kekuatan mereka tambah solid, khususnya dalam memengaruhi kelompok kaum bangsawan di Sulawesi Selatan.

Kedua, ada kerinduan masyarakat Sulawesi Selatan untuk dipimpin kembali oleh kaum bangsawan. Kerinduan ini semakin menegaskan betapa pentingnya sosok

bangsawan dalam pemerintahan di Sulawesi Selatan. Sebagaimana dikatakan Najamuddin elite bangsawan memiliki kewibawaan dan mampu menggerakkan masyarakat karena memiliki pengetahuan dan pandangan yang jauh ke depan (Najamuddin, 2015: 2). Selain itu, dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang hirarkis, telah memberikan posisi istimewa kepada kaum bangsawan sebagai elite strategis yang memerintah. Ini semua merupakan modal politik kaum bangsawan untuk tampil kembali dalam kekuasaan. Melalui mekanisme *power sharing* sesama bangsawan mereka berhasil memperoleh kekuasaan dengan perolehan suara sebesar 43,87 persen dan menang di enam belas kabupaten dan kota. Implikasinya adalah politik simbolik yang direpresentasikan sebagai elite tradisional semakin menguat. Pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman telah mengembalikan kaum bangsawan dalam kekuasaan formal sebagai gubernur (Haboddin, 2015: 10).

*Power sharing* antara bangsawan Bugis dan bangsawan Makassar merupakan koalisi ideal untuk berkuasa dalam pemerintahan. Hal ini sangat dimungkinkan melalui pemilihan gubernur secara langsung. Dalam sistem pemilihan secara langsung—kaum bangsawan lebih siapa bertarung. Bahkan, perjuangan kaum bangsawan dalam mendapatkan pengakuan, baik dari negara maupun kelompok sosial lainnya berhasil diperoleh atas kapasitas dan kecerdasannya melakukan *power sharing* sebagai strategi dalam rangka meraih jabatan gubernur di Sulawesi Selatan (Afala, 2019: 3).

## Penutup

*Power sharing* merupakan pilihan politik yang paling rasional untuk diterapkan dalam masyarakat multietnis. Negara Malaysia menurut analisa Mandal (2007:1 231-232) elite politiknya sangat bangga karena berhasil menerapkan pembagian kekuasaan sebagai formula dalam mengelola konflik sekaligus menjaga kestabilan politik. Cara pandang Mandal sangat berbeda dalam praktik *power sharing* di Indonesia. Para politisi di Indonesia melakukan strategi *power sharing*—bukan dalam rangka mengelola konflik dan menjaga stabilitas politik, tetapi lebih pada upaya meraih kekuasaan jabatan publik. Pilihan politik sangat pragmatis karena lebih didominasi pada kejelian dalam memanfaatkan struktur peluang politik yang tersedia.

Untuk itu, dalam mengoperasionalisasi *power sharing* di tingkat lokal bisa dipilah menjadi dua bentuk. Pertama, praktik *power sharing* dilakukan melalui perhitungan politik identitas dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Disejumlah daerah yang multietnis senantiasa mengedepankan *power sharing* antarkekuatan yang ada dalam masyarakat (Haboddin, 2015: 44; Haboddin & Afala, 2019: 45-47). Misalnya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, NTT, dan Maluku melakukan *power sharing* berdasarkan politik identitas. Praktik *power sharing* yang berpijak pada politik identitas sudah jamak dilakukan oleh elite politik lokal di

bagian Timur Indonesia. sebab, masyarakatnya dikenal multi-etnis dan berlapis secara vertialitas: bangsawan dan non-bangsawan.

Kedua, praktik *power sharing* dilakukan berdasarkan koalisi antara kaum bangsawan dalam pemilihan gubernur. Kasus Sulawesi Selatan merupakan model baru dalam *power sharing*. Dikatakan baru, karena untuk pertama kalinya bangsawan Makassar dan bangsawan Bugis berkoalisi dalam pemilihan gubernur. Berkoalisi sembari menerapkan *power sharing* merupakan strategi dalam memenangkan pemilihan gubernur secara langsung, bebas, dan demokratis. Dengan kata lain, aktor politik lokal sangat gencar melakukan *power sharing* untuk merebut kekuasaan jabatan gubernur. Tujuannya adalah agar mereka berkuasa sebagai elite yang memerintah.

Keterpilihan kaum bangsawan sebagai gubernur dan wakil gubernur merupakan terobosan dalam menjalankan politik *power sharing*. Terobosan ini bisa menjadi agenda riset ke depan dalam menelaah perilaku elite lokal dalam meraih kekuasaan dengan berpijak pada mekanisme *power sharing*. Apalagi dalam masyarakat yang berjenjang dan berkasta, maka pilihan *power sharing*, baik dengan cara berkoalisi sesama bangsawan atau pun berkoalisi antara bangsawan dengan non-bangsawan belum banyak dibahas oleh para analis dan pakar politik. Untuk itu, terbuka ruang bagi kita semua yang memiliki perhatian untuk berkontribusi dan menggairahkan pentingnya politik *power sharing* untuk didalami secara serius dan kritis. Harapan penulis adalah memberikan perspektif baru dalam memaknai eksistensi kaum bangsawan maupun non bangsawan dalam dinamika politik lokal di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada kolega penulis yang telah berbagi diskusi dan memberi masukan. Untuk penulisan artikel ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka

- Afala, L. O. M. (2018). *Politik Identitas di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Afala, L. O. M. (2019). *Rezim Adat dalam Politik Lokal*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bellamy, R. (1990). *Teori Sosial Modern: Perspektif Italia*. LP3ES.
- Bloch, M. (1983). Kaum Bangsawan Selaku Kelas Menurut Kenyataan. In *Elite dalam Perspektif Sejarah* (Kartodirdj). LP3ES.
- Diamond, L., & Plattner, M. F. (1998). *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*. -.
- Fahmid, I. M. (2012). *Identitas dalam Kekuasaan: Hibriditas Kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elite Bugis & Makassar*. Innawa-ISPEI.

- Gazalirrahman. (2009). Potret Pilkada di Kab Barito Utara. *Jurnal Renai*, 9(2).
- Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan Di Negara-Negara Baru. In *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gianie. (2009). *Paduan Etnisitas di Kancah Politik*. Jakarta: Kompas.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Haboddin, M. (2015). Merawat Politik Identitas dalam Pilkada. In *Dinamika Politik Indonesia Kontemporer* (Joko Purno). Malang: BPPM Fisip UB.
- Haboddin, M., & Afala, L. O. M. (2019). *Kembalinya Elit Tradisional Sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta.
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 291–308.
- Hefner, R. W. (2007). *Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius.
- Heryanto, A. (2004). Gugatan Terhadap Otoriterisme di Indonesia dan Malaysia. In *Menggugat otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Izzah, A., & Atmansyah, L. (2014). *911 Ala Bantaeng: Eksistensi Brigade Siaga Bencana Dalam Pelayanan Kesehatan di Bantaeng*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 215–228.
- Kleden, I. (2001). *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Kompas.
- Mandal, S. (2007). Batas-Batas dan Luar Batas. In *Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan* (Hefner Rob, p. 231). Yogyakarta: Kanisius.
- Manguelle, D. E. (2006). Perlukah Afrika Sebuah Program Penyesuaian Budaya? In *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia* (Harrison d, pp. III–128). Jakarta: LP3ES.
- Najamuddin, N. (2015). Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 11(1).
- Nasikun. (2001). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pariela, T. D. (2009). Politik Identitas dan Politik Perilaku. *Jurnal Renai*, 9(2).
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (Vol. 3). Psychology Press.
- Sahajuddin. (2011). *Butta Toa Bantaeng Menjawab Zamannya 1666-1905*. Makasar: Pustaka Sawerigading.
- Sanderson, S. (2000). *Makro Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, P. (2018). Lokalitas Sebagai Konteks untuk Berdemokrasi. In P. Santoso, L. N. Bayo, & W. P. Samadhi (Eds.), *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stavenhagen, R. (2004). Dekonolisasi Ilmu-Ilmu Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial* (Martyn Ham). Surabaya: Jawa Pos Press.

- Strauss, Anselm, & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwardi, Harsono, & Dkk. (2002). *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Malang: Galang Press.
- Tanasaldy, T. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In *Politik Lokal Di Indonesia* (Henk Schul). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Tentang Penulis**

**Muhtar Haboddin** adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Penulis memiliki area riset seputar demokrasi lokal, politik lokal, dan pemilu.

**La Ode Machdani Afala** adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Penulis memiliki area riset seputar demokrasi lokal, studi desa, dan politik identitas.